

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi mahasiswa intrakampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan No.155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah untuk berkumpul, bekerjasama demi mencapai tujuan. Begitu pula dengan organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana bagi mahasiswa untuk belajar, berkumpul, dan mengembangkan potensi kepemimpinannya. Salah satu organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi layaknya sebuah pemerintahan.

Sejarah mencatat sebelum tahun 1988 telah diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus / Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) pada masa Orde Baru cukup mengekang pergerakan mahasiswa. Selanjutnya berganti menjadi Organisasi Kemahasiswaan yang disebut dengan Dewan Mahasiswa dan pada tahun 1991 berubah menjadi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Melemahnya Orde Baru hingga masa kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto memunculkan Keputusan

Mendikbud No. 155/U/1998 yang kemudian melahirkan Organisasi Mitra Kampus, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau disingkat dengan BEM UNJ merupakan satu-satunya lembaga intra kampus yang legal di Universitas Negeri Jakarta. Peran BEM UNJ sendiri untuk sebuah universitas yaitu stabilisasi dan kontrol sosial terhadap kehidupan dan kebijakan kampus melalui jalur audiensi dan advokasi. BEM UNJ tampil melaksanakan hasil sidang umum Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ yang memiliki beberapa fungsi. Diantara fungsi tersebut yaitu fungsi aspirasi yang kemudian disampaikan dan dibahas bersama BEM UNJ untuk dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. BEM UNJ juga menjadi penghubung informasi dari tataran pimpinan kampus ke mahasiswa.

Struktur kepengurusan berdasarkan Keputusan Mendikbud No. 155/U/1998, Bab IV, Pasal 7 Ayat (1) adalah Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris, bendahara dan anggota pengurus¹. Sedangkan menurut Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada Pasal 10 ayat (2) mengatakan bahwa Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berhak menjadi anggota Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta setelah

¹ Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan No.155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing - masing Organisasi Kemahasiswaan tersebut.²

Dengan adanya peraturan tersebut maka siapapun selama ia merupakan seorang mahasiswa aktif boleh berpartisipasi menjadi anggota organisasi atau BEM tanpa terkecuali. Di BEM UNJ sendiri struktur kepengurusannya terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, dan tiga departemen dengan fokus bidangnya masing-masing. Organisasi Mahasiswa Intrakampus di Universitas Negeri Jakarta telah berjalan selama 25 periode. Di mulai dari Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) pada tahun 1992 hingga menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada tahun 1998 sampai saat ini.

Satu periode pemerintahan BEM UNJ hanya terdiri dari satu tahun masa jabatan. Kemudian jika telah habis masa periodenya, maka akan diadakan pemilihan umum untuk kembali memilih ketua dan wakil ketua BEM UNJ. Di mana sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi, yakni akan dipilih oleh seluruh mahasiswa UNJ. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi Setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta memiliki hak suara dalam Pemilihan Umum³.

Sedangkan pengurus bidang dalam hal ini merupakan anggota BEM UNJ dipilih oleh Badan Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa atau yang

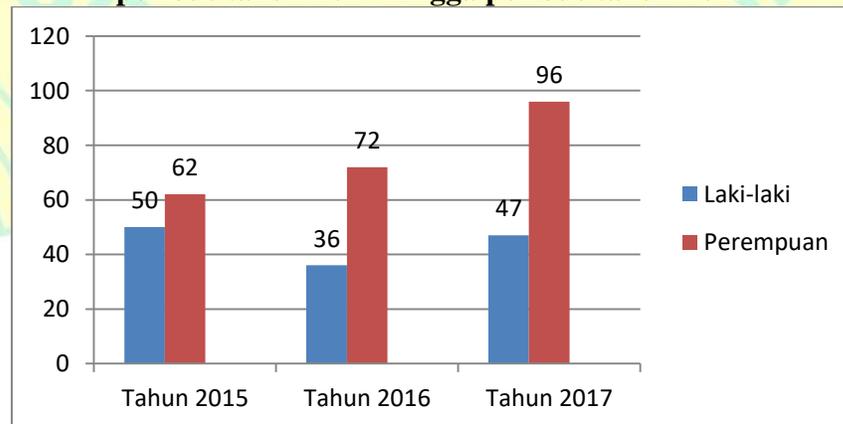
² Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (AD ART)

³ *Ibid.*,

disingkat BPH BEM UNJ yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, dan kepala masing-masing bidang atau departemen. Di mana setiap persyaratan maupun kriteria calon anggota diberikan hak sepenuhnya untuk dibuat sendiri sesuai kesepakatan BPH BEM UNJ pada periode yang sedang berjalan.

Jumlah keanggotaan BEM UNJ selama tiga periode terhitung mulai dari periode tahun 2015 hingga tahun 2017 cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan baku yang mengatur jumlah pasti anggota BEM UNJ tiap periodenya. Ketentuan jumlah anggota atau pengurus BEM UNJ ditentukan sesuai kesepakatan pengurus inti atau dalam hal ini adalah keputusan Ketua BEM UNJ bersama dengan BPH. Kebijakan inilah yang membuat BPH BEM UNJ berhak memilih dan memberhentikan anggota BEM UNJ menjadi salah satu indikator jumlah keanggotaan BEM UNJ tidak konsisten. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah keanggotaan BEM UNJ :

Grafik I.1
Jumlah anggota laki-laki dan perempuan di BEM UNJ
periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017.



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BEM UNJ periode tahun 2015, 2016 dan 2017

Terlihat pada grafik di atas, total keseluruhan anggota BEM UNJ berbeda-beda tiap tahunnya. Di mana total keanggotaan paling sedikit terdapat pada periode tahun 2016 dengan jumlah 108 anggota. Sedangkan total keanggotaan paling banyak terdapat pada periode tahun 2017 dengan jumlah 143 anggota. Dapat dilihat terjadi lonjakan yang cukup tinggi partisipasi perempuan pada periode tahun 2017 dengan total jumlah anggota perempuan sebanyak 96 anggota.

Adapun rincian total anggota BEM UNJ sebagai berikut. Periode tahun 2015 jumlah perempuan sebanyak 62 anggota dan jumlah laki-laki sebanyak 50 anggota. Periode tahun 2016 jumlah perempuan sebanyak 72 anggota dan jumlah laki-laki sebanyak 50 anggota. Dan terakhir, periode tahun 2017 jumlah perempuan sebanyak 96 anggota dan jumlah laki-laki sebanyak 47 anggota.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota perempuan BEM UNJ selama periode tiga kali kepengurusan lebih besar daripada jumlah anggota laki-lakinya. Berdasarkan kondisi di atas kemudian tidak menjamin apakah perempuan khususnya anggota perempuan BEM UNJ mendapatkan posisi strategis di dalam kepengurusan BEM UNJ. Karena, sepanjang sejarah BEM UNJ berdiri belum pernah ada anggota perempuan yang menjadi ketua BEM UNJ. Begitupun kepala departemen yang selalu diisi oleh kaum laki-laki.

Hambatan yang sering dihadapi kaum perempuan ketika masuk ke dalam lembaga politik terbagi atas hambatan struktural dan hambatan kultural. Hambatan

struktural berkaitan dengan permasalahan status sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan hambatan kultural terkait dengan faktor budaya dan doktrin agama dalam masyarakat. Faktor budaya juga menjadi penghambat partisipasi politik perempuan seperti pengaruh budaya patriarki. Dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan didukung oleh ideologi gender yaitu pola relasi laki-laki dan perempuan sebagai proses hasil budaya yang kemudian dibekukan. Laki-laki berada pada kelas *superior* dan perempuan sebagai kelas inferior. Kondisi ketimpangan ini menjadikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua atau "*the second class*" di masyarakat.

Dalam penelitian ini, alasan peneliti memilih BEM UNJ sebagai objek penelitian adalah karena menurut peneliti BEM UNJ merupakan salah satu lembaga pemerintahan formal universitas atau organisasi mahasiswa intrakampus yang cukup berpengaruh sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mewakili organisasi pemerintahan mahasiswa UNJ ke dalam dan keluar kampus, memberikan saran dan kritik kepada lembaga legislatif mahasiswa, melakukan kordinasi dengan pihak rektorat dan lembaga, serta kegiatan politik lainnya.

Peneliti merasa tertarik melihat fakta bahwa di dalam keanggotaan BEM UNJ jumlah anggota perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah anggota laki-laki. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa partisipasi perempuan di ranah publik, khususnya di dalam lingkungan UNJ cukup tinggi. Namun, peneliti melihat bahwa fakta ini tidak lantas menjadikan perempuan dapat berperan strategis di dalam kepengurusan BEM UNJ.

Pertama, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang perempuan khususnya mahasiswi UNJ menjadi anggota organisasi mahasiswa intrakampus seperti BEM UNJ. Adakah perbedaan dengan latar belakang anggota laki-laki menjadi anggota BEM UNJ. Kemudian peneliti tertarik melihat faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang membuat perempuan dengan kuantitasnya yang banyak dalam struktur kepengurusan BEM UNJ tetapi, tidak menempati posisi sebagai ketua atau kepala departemen.

Lebih jauh peneliti akan melihat menggunakan konsep gender apakah kemudian terdapat budaya patriarki dengan adanya otoritas kekuasaan sehingga memunculkan ketidakadilan gender bagi anggota perempuan BEM UNJ. Bagaimana kemudian dengan adanya ketidakadilan gender ini melahirkan apa yang disebut dengan kesadaran gender. Peneliti juga ingin menggambarkan apabila kesadaran gender di antara anggota perempuan di BEM UNJ ini direalisasikan, maka apa yang akan terjadi dengan kepengurusan BEM UNJ dan dampak yang mungkin akan muncul.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai organisasi eksekutif yang menjalankan pemerintahan tentunya BEM UNJ membutuhkan struktur kepengurusan yang dapat bersama-sama mencapai tujuan serta cita-cita. Oleh karenanya, pengkaderan anggota menjadi faktor penting dalam berjalannya kepengurusan selama satu periode kedepan. Dalam kepengurusan BEM UNJ selama tiga periode mulai tahun 2015 hingga tahun 2017, presentasi perempuan

yang berpartisipasi dapat dikatakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah anggota laki-laki. Namun, posisi strategis masih didominasi oleh kaum laki-laki. Seperti Ketua BEM UNJ yang selama ini tidak pernah diisi oleh anggota perempuan ataupun Kepala Departemen yang juga selalu diisi oleh anggota laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dirumuskan beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian. Rumusan permasalahan ini ditujukan agar dapat memaparkan hasil penelitian dari dinamika yang terjadi, sehingga nantinya bisa dipahami dan dicermati atas permasalahan yang ada. Sesuai dengan paparan diatas, rumusan masalah penelitian meliputi:

1. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi perempuan dalam memperoleh posisi strategis di struktur kepengurusan BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017?
2. Bagaimana Dinamika Kesetaraan Gender memainkan perannya dalam kontestasi Organisasi Kemahasiswaan BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017?

1.3. Batasan masalah

Peneliti membatasi konteks pembahasan kepada anggota perempuan dalam kepengurusan BEM UNJ selama periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Langkah ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan terkait bagaimana kemudian jumlah

anggota perempuan lebih banyak daripada jumlah anggota laki-laki dalam kepengurusan BEM UNJ.

Namun, posisi strategis selalu didominasi oleh anggota laki-laki. Melihat dengan cermat apa yang melatarbelakangi hal tersebut. Salah satunya dengan mengetahui alasan perempuan masuk ke dalam ranah politik, khususnya bergabung ke dalam kepengurusan BEM UNJ. Bagaimana kemudian otoritas Ketua BEM UNJ ikut andil dalam terjadinya situasi tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang membuat anggota perempuan yang jumlahnya banyak namun, tidak menempati posisi strategis dalam kepengurusan. Serta bagaimana kemudian anggota laki-laki mendominasi dalam kepemilikan posisi strategis dalam kepengurusan di BEM UNJ. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi perempuan dalam memperoleh posisi strategis di struktur kepengurusan BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017?
2. Mendeskripsikan Dinamika Kesetaraan Gender memainkan perannya dalam kontestasi Organisasi Kemahasiswaan BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017?

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu berupa manfaat akademik dan manfaat praktis. Untuk kategori akademik manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai upaya menjelaskan kepada pembaca mengenai dinamika kesetaraan gender dalam kontestasi di kepengurusan BEM UNJ. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam keilmuan sosiologi, terutama mengenai konsep gender.

Untuk manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengalaman bagi peneliti dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapat selama berkuliah dalam bentuk karya tulis yang nyata. Diharapkan pula dapat bermanfaat sebagai rekomendasi bagi penelitian sejenis yang juga memiliki fokus kajian mengenai dinamika politik perempuan dengan fokus gender.

1.6. Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan pustaka sejenis berguna sebagai bahan acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun tinjauan penelitian yang mengkaji tentang politik perempuan sudah banyak ditulis dan dengan mudah dapat ditemukan. Peneliti berusaha mengkaji dan mencermati secara spesifik beberapa jurnal, tesis serta karya ilmiah sesuai dengan konsep yang digunakan peneliti. Hal ini juga berguna agar menghindari penelitian yang sama atau biasa disebut dengan plagiat penelitian. Kegunaan lain dari bagian tinjauan pustaka ini adalah melihat kekurangan atau perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga

nantinya, peneliti berharap dapat menutupi kekurangan tersebut sesuai dengan kajian yang akan peneliti bahas. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis Wirdanengsih yang berjudul *Perempuan Parlemen: Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Politisi Perempuan di DPR RI*⁴. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pola rekrutmen politisi perempuan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, akses politisi perempuan terhadap lembaga legislatif dan pengaruh gender terhadap politisi perempuan. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Ilmu politik, jaringan sosial dan konsep gender. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis sebagai cara menggambarkan data.

Argumen Wirdanengsih yaitu melihat dalam rekrutmen politik perempuan parlemen terdapat beberapa aspek yang menentukan seorang politisi perempuan memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Adapun dilihat dari aspek individu sebagai berikut:

- a) Aspek Pendidikan

⁴ Wirdanengsih, *Perempuan Parlemen: Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Politisi Perempuan di DPR RI*, Tesis, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia.

Almond melihat bahwa pendidikan dapat mengembangkan kecakapan menganalisa, menciptakan minat dan kemampuan dalam berbagai hal. Melalui pendidikan bisa didapatkan berbagai informasi, termasuk tentang politik dan persoalan-persoalan politik.

b) **Pengalaman Organisasi**

Aktivitas perempuan DPR RI dalam kepengurusan organisasi cenderung membuka peluang bagi dirinya untuk dipilih sebagai anggota DPR. Dalam merekrut kader perempuan untuk menduduki kursi DOR, pada umumnya partai memiliki sumber kader utama yaitu organisasi-organisasi perempuan. Pengalaman berorganisasi kader-kader perempuan yang berada di organisasi istri akan sejalan dengan perkembangan kader suaminya.

c) **Latar belakang pekerjaan**

Vicky Randall mengatakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang akan membuka peluang bagi perempuan untuk menggeluti dunia politik.

d) **Status Sosial Ekonomi**

Politisi yang memiliki pekerjaan tetap sebelum menjadi anggota DPR dari sudut pandang ekonomi, mereka dapat dikatakan mandiri dan tidak mempunyai masalah keuangan.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek hubungan di mana hubungan sosial yang dimiliki memiliki andil yang besar bagi politisi perempuan untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Pengaruh yang dimiliki kader perempuan berupa adanya jalinan keluarga dengan orang-orang tertentu di partai, ikatan pertemanan yang didasarkan pada kelompok atau organisasi dan status sosial ekonomi membuka peluang lebih besar bagi kader perempuan untuk dicalonkan partai sebagai anggota DPR. Hubungan primordial dalam hal ini seperti suku, ras, dan agama diyakini juga mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih atau prestasi yang dimiliki seseorang perempuan belum cukup mengantarkan perempuan ke dalam elit perpolitikan. Masih dibutuhkan pemilikan dan penguasaan akses serta koneksi dengan kelas yang berkuasa atau harus memiliki jaringan sosial. Dalam situasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu seseorang individu dapat menjadi anggota suatu jaringan dan dalam situasi yang lain, ia dapat menjadi anggota jaringan sosial lainnya.

Peran perempuan di sektor publik dalam hal ini perempuan sebagai anggota DPR RI, Perspektif Gender melihat subordinasi perempuan di sektor publik bukan karena faktor biologis tetapi lebih diakibatkan oleh faktor kultur. Perbedaan biologis menjadi bermakna politis, ekonomis, dan sosialis manakala tatanan kultural dalam masyarakat mengenai pembagian kerja secara hirarkis antara perempuan dan laki-laki sehingga faktor kultural ditransformasikan ke dalam

masalah sosial dan politik. Sehingga pada akhirnya menyebabkan subordinasi perempuan oleh laki-laki baik sektor publik maupun domestik. Maka, kultur menjadi suatu simbol dalam penajaman perbedaan seksual (Jo Freeman, 1970).

Kedua, tesis yang ditulis oleh Dina Anggita Lubis dengan judul *Partisipasi Politik Perempuan di PDP PKS Kota Medan*⁵. Penelitian ini berusaha melihat tingkat keterwakilan perempuan, khususnya Perempuan PKS di Kota Medan serta melihat partisipasi politik perempuan dilihat dari tingkat keterwakilannya. Dalam menganalisis tesisnya peneliti Dina Anggita Lubis menggunakan teori sosiologi gender dan konsep partisipasi politik. Dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara mendalam, studi dokumentasi, browsing, dan *clipping print*.

Dalam tesis ini juga menjelaskan masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu menurut Syafiq Hasyim (2001 : 124), yaitu:

- Keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik
- Komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan
- Kendala nilai-nilai budaya
- Interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki, dan minat, hasrat, animo, para perempuan untuk terjun dalam

⁵ Dina Anggita Lubis, *Partisipasi Politik Perempuan di PDP PKS Kota Medan*, Tesis, Tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara.

kancah politik rendah.

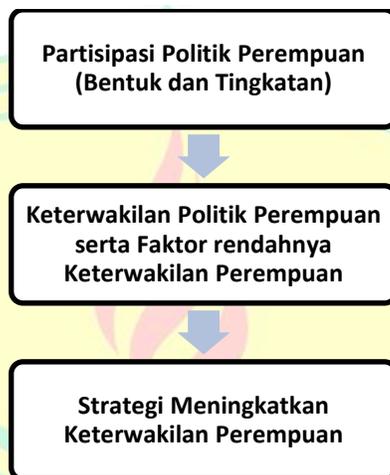
Dita Anggita Lubis memaparkan bahwa substansi partisipasi politik tidak lepas dari proses sosialisasi politik, pendidikan politik, dan rekrutmen politik. Sosialisasi politik perempuan dalam tesis ini dijelaskan sebagai proses penanaman nilai-nilai dan pembentukan sikap dan pola tingkah laku politik perempuan. Pendidikan politik meyangkut proses seseorang diperkenalkan dengan sistem politik, sedangkan rekrutmen politik adalah suatu proses saat parpol mencari anggota perempuan yang berbakat untuk menjadi kader pengurus atau calon legislatif. Perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Kelompok pertama adalah perempuan yang memperoleh jabatan politik karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu.
- b) Kelompok kedua adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas tugas dalam membesarkan anak-anaknya.
- c) Kelompok ketiga adalah perempuan yang dalam usia muda 3-an terjun ke dalam politik, biasanya telah lama aktif dalam dunia ormas, LSM, atau organisasi ekstra kampus.

Berikut adalah alur pemikiran permasalahan penelitian:

Skema I.1

Alur Pemikiran Permasalahan Penelitian Dita Anggita



Sumber: Analisis Dina Anggita Lubis dalam Tesis yang berjudul *Partisipasi Politik Perempuan di PDP PKS Kota Medan*.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat kenaikan jumlah partisipasi perempuan di DPRD Kota Medan selama dua periode, yaitu periode 1999-2004 anggota dewan perempuan di DPRD Kota Medan berjumlah 3 (tiga) dari 85 orang jumlah keseluruhan anggota dewan. Minimnya partisipasi perempuan dalam aktifitas politik khususnya di DPRD Kota Medan dikarenakan berbagai hambatan baik kultural maupun struktural. Paktek-praktek sosial cenderung melegitimasi peran domestik serta stereotipe yang meminggirkan perempuan. Kuatnya hegemoni patriarki baik dari pandangan bahwa politik itu lekat dengan dunia laki-lai maupun karena alasan agama. Salah satu cara dan strategi untuk menguatkan partisipasi perempuan adalah dengan kebijakan *affirmative action* yang ditetapkan pemerintah melalui UU No. 12

Tahun 2003 tentang pemilu yang mencantumkan himbauan memnuhi keterwakilan perempuan sejumlah 30% dalam pencalonan anggota legislatif di masing-masing parpol.

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Siti Nimrah dan Sakaria dalam Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang berjudul *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dlm Pemilu Legislative 2014*⁶. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka dari berbagai literatur. Permasalahan yang ingin diangkat adalah keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, khususnya dalam kelembagaan formal masih jauh dari yang diharapkan.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memaparkan bahwa negara yang menganut sistem patriarki, laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Hal inilah yang membuat terjadinya pembagian kerja terhadap perempuan, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan, baik dalam keluarga, maupun di tempat kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan

⁶ Siti Nimrah dan Sakaria, *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014*, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas, Volume 1, No2, 2015.

proses seleksi dalam partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Dari hasil pemilu legislatif pada tahun 2014 menunjukkan perempuan masih menduduki posisi kedua dalam kelembagaan formal yaitu kursi anggota DPRD. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka keterwakilan perempuan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal, kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 (Dina Manafe: Suara Pembaruan).

Argumen dalam penelitian ini mengenai tantangan terbesar bagi caleg perempuan adalah caleg dari sesama perempuan itu sendiri, dengan beragam budaya politik lokalnya, tingkatan keterkungkungan mereka dalam budaya patriarki lokal, tingkat pendidikannya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri. Gender dalam bidang politik melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam politik harusnya sama dan mendapatkan tempat yang sama dengan tempat yang biasa laki-laki tempati (Tandang, 2004:67). Persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah lelaki.

Keempat, penelitian jurnal internasional yang ditulis oleh Damilola Taiye Agbalajobi dengan judul *Women's participation and the political process in Nigeria: Problems and prospects*⁷. Penelitian ini berusaha melihat perempuan Nigeria yang berpartisipasi ke dalam dunia politik di pemerintahan. Mengetahui permasalahan dan pengaruh partisipasi politik perempuan dalam berproses di ranah politik. Penelitian jurnal internasional ini menggunakan riset kualitatif dengan data telaah literatur.

Damilola Taiye Agbalajobi memaparkan bahwa politik perempuan di Nigeria telah pada permukaan tingkat kesetaraan gender secara politis, hal ini diasumsikan bahwa secara konstitusional tidak ada hambatan untuk partisipasi perempuan. Gerakan perempuan dapat dikatakan telah sebagian besar bertanggung jawab untuk peningkatan partisipasi politik perempuan. Terdapat perbedaan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Di mana representasi deskriptif berasal dari konstituen masing-masing. Sedangkan substantif disebut representasi berdasarkan gender (memprioritaskan mengejar kepentingan perempuan oleh wakil-wakil perempuan).

Konstitusi Nigeria 1979 telah menjamin hak-hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Namun, beberapa dekade terakhir partisipasi perempuan relatif meningkat. Ini adalah ketika diukur dari suara perempuan dalam pemilu, perempuan yang bekerja di kantor umum, jumlah perempuan terkait dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, dll. Akan tetapi, pada penelitian ini

⁷ Damilola Taiye Agbalajobi, *Women's participation and the political process in Nigeria: Problems and prospects*, African Journal of Political Science and International Relations, Volume 4, No.2, 2010

fakta menyatakan representasi peningkatan perempuan dalam politik yang masih berada di bawah laki-laki.

Peneliti berpendapat aspirasi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan didasarkan atas peran perempuan di Nigeria untuk mewakili setengah dari penduduk yang ada dan karenanya harus diperbolehkan dalam pengambilan keputusan yang adil. Semua manusia memiliki hak yang sama dan perempuan juga memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan publik.

Keluarga adalah lembaga utama patriarki (Kate Millet, 1970), yang merupakan konsep penting dalam menjelaskan ketidaksetaraan gender. Merujuk kepada masyarakat yang memerintah dan didominasi oleh laki-laki atas perempuan. Hal ini melekat dalam keluarga Afrika. Memberikan laki-laki status sosial yang lebih tinggi atas perempuan telah merasuk ke dalam kehidupan publik, yang tercermin dalam kegiatan negara. Keluarga memainkan peran penting dalam mempertahankan urutan patriarkal ini di seluruh generasi. Sosialisasi anak-anak dan dalam menerima peran yang berbeda di kehidupan telah menciptakan sebuah mekanisme sosial untuk pengembangan nilai-nilai yang menimbulkan beberapa bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin perempuan.

Laki-laki lebih memiliki kekuatan yang lebih unggul dan daya saing serta kemandirian untuk siap berkompetisi di ranah politik. Sedangkan perempuan dianggap terlalu pasif untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan. Hal ini juga

dibangun dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang telah disosialisasikan berdasarkan peran gender yang berbeda sesuai dengan perbedaan biologis. Persepsi perempuan melihat politik adalah sebagai ranah yang 'kotor' dan menakutkan sehingga menjauhkan kaum perempuan dari arus utama politik. Perempuan dianggap hanya sebagai pendukung dan tim penghibur dibanding dengan peran laki-laki.

Nilai masyarakat menganggap bahwa kegiatan politik maskulin sebagai penyebab politisi lebih memilih calon laki-laki atas perempuan. Kesuksesan yang dicapai oleh perempuan dalam politik telah adalah melalui gerakan perempuan yang mensponsori aspirasi finansial politik perempuan sebaliknya. Praktek-praktek adat di masyarakat kontemporer menghasilkan bias. Dampak keseluruhan bias gender, norma-norma budaya dan praktek telah menanamkan perasaan rendah diri pada perempuan dan menempatkan mereka pada kerugian dibanding laki-laki dalam hal sosio-politik.

Konstruksi norma-norma sosial dan stereotipe bahwa peran perempuan lebih feminin atau lebih lemah. Maka adanya tindakan afirmatif adalah untuk mengilangkan diskriminasi perempuan. Tindakan afirmatif tidak serta merta menjamin keterwakilan perempuan di mana perempuan yang merupakan setengah dari populasi negara terus-menerus dikesampingkan dalam kehidupan publik. Faktor lainnya yang menjadi hambatan bagi partisipasi politik perempuan adalah doktrin beberapa agama yang bertentangan dengan prinsip partisipasi politik perempuan yang

ingin aktif dalam politik dan posisi otoritas. Dengan serangkaian pencerahan, emansipasi, dan kesadaran akan gerakan perempuan, telah mendorong lebih banyak perempuan dalam politik.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa keterbelakangan perempuan di ranah politik telah menimbulkan suatu kesadaran tentang keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik. Namun, kebanyakan perempuan berpartisipasi dalam politik pada dasarnya adalah untuk mendukung golongan kaumnya sendiri, hal ini merupakan tanggung jawab substansi. Perempuan menggunakan platform gerakan perempuan untuk merebut kekuasaan politik dan meningkatkan partisipasi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Partisipasi perempuan dapat menentukan kebijakan negara yang responsif gender. Suara perempuan dapat didongkrak dengan kehadiran gerakan perempuan dan didorong dengan kebijakan afirmatif.

Diantara persamaan yang terdapat pada ketiga penelitian tersebut adalah sama-sama menjadikan perempuan sebagai subjek penelitian dengan melihat dinamika perempuan di ranah politik. Pertama, pada konteks fokus penelitian di mana ketiga penelitian membahas mengenai partisipasi ataupun keterwakilan perempuan di ranah politik. Masing-masing menjelaskan aspek-aspek apa saja yang menentukan perempuan dapat memperoleh kedudukan di suatu kelembagaan politik. Kedua, memaparkan faktor-faktor penyebab dominasi laki-laki atas perempuan, khususnya di

ranah politik. Ketiga, pada penelitian sejenis sama-sama menganalisis dinamika politik perempuan menggunakan analisis politik dan gender.

Namun, masing-masing penelitian berbeda fokus subjek penelitiannya. Peneliti pertama subjek penelitiannya adalah perempuan di DPR RI. Peneliti kedua fokus penelitiannya adalah perempuan di partai politik. Sedangkan penelitian ketiga lebih kepada calon legislatif secara keseluruhan. Dan penelitian keempat berfokus kepada perempuan secara umum di Negara Nigeria. Berbeda pula dengan subjek yang peneliti ambil dalam penelitian skripsi ini. Peneliti lebih memfokuskan subjek penelitian kepada anggota perempuan organisasi intrakampus atau organisasi politik universitas.

Secara lebih lanjut persamaan dan perbedaan keempat tinjauan pustaka tersebut dengan penelitian skripsi yang dilakukan peneliti akan berusaha dijabarkan secara detail dalam tabel berikut;

Tabel 1.1
Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiridanengsih. 2002. <i>Perempuan Parlemen: Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Politisi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI</i> . Depok: Tesis [tidak diterbitkan]	Menjelaskan pola rekrutmen yang seperti apa sehingga politisi perempuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, akses politisi perempuan terhadap lembaga legislatif dan	Sama-sama memaparkan proses rekrutmen perempuan di suatu lembaga politik dengan berbagai aspek penentu.	Subjek penelitian di mana peneliti ruang lingkupnya lebih kecil, yakni lembaga politik di Universitas Negeri Jakarta.

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pengaruh gender terhadap politisi perempuan.		
2.	Lubis, Dina Anggita. 2009. <i>Partisipasi Politik Perempuan di PDP PKS Kota Medan</i> . Medan: Tesis [tidak diterbitkan]	Menjelaskan mengenai rendahnya tingkat keterwakilan perempuan, khususnya Perempuan PKS di Kota Medan dan melihat partisipasi politik perempuan dilihat dari tingkat keterwakilannya.	Sama-sama menganalisis keterwakilan perempuan di ruang publik, di mana bukan sebagai pemegang posisi strategis. Menjelaskan juga mengenai hegemoni patriarki.	Pada penelitian sejenis ini tidak membahas lebih lanjut mengenai pengaruh gender terhadap keberlangsungan politisi perempuan di ranah politik
3.	Nimrah, Siti dan Sakaria. 2015. <i>Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dlm Pemilu Legislative 2014</i> . Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1 No. 2, 173-182	Menjelaskan bahwa pasca disahkannya undang-undang keterwakilan perempuan dalam partai politik menyebabkan kaum perempuan terjun ke dunia politik. Namun, keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, khususnya dalam kelembagaan formal masih jauh dari yang diharapkan.	Sama-sama menjelaskan dinamika politik perempuan dan memaparkan faktor budaya, yakni budaya patriarki di ranah kehidupan politik masyarakat.	Tidak membahas lebih dalam mengenai aspek selain patriarki. Sedangkan peneliti membahas pula aspek dan nilai-nilai budaya lainnya. Seperti tindakan afirmatif dan doktrin agama.
4.	Agbalajobi , Damilola Taiye. 2010. <i>Women's Participation And The Political Process In Nigeria: Problems And Prospects</i> . African	Menjelaskan Keterbelakangan perempuan di ranah politik yang kemudian telah menimbulkan suatu kesadaran tentang keterwakilan	Sama-sama menjelaskan dominasi laki-laki atas perempuan disertai dengan penjabaran budaya patriarki	Lingkup fokus subjek penelitian yang sangat berbeda dengan peneliti, di mana pada penelitian Agbalajobi D.T lebih melihat

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Journal of Political Science and International Relations Vol. 4(2).	perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan menggunakan platform gerakan perempuan untuk merebut kekuasaan politik dan meningkatkan partisipasi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender.	dan doktrin agama.	secara menyeluruh mengenai perempuan di ranah politik pada suatu negara. Ini berarti di berbagai lembaga politik yang ada

Sumber: Interpretasi Peneliti (2021)

1.7. Kerangka Konseptual

Untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan konsep sebagai berikut:

1.7.1 Nature dan Nurture

Nature dalam gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan biologis. Richard A. Lippa, dalam bukunya berjudul *Gender, Nature, and Nurture* berpendapat bahwasannya berbagai teori biologi gender menunjukkan adanya beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa kita mungkin dalam batas tertentu terlahir sebagai maskulin atau feminin. Dasar biologis dari perbedaan jenis kelamin jelas untuk ciri-ciri fisik. Perempuan menghasilkan sel telur dan laki-laki menghasilkan sperma. Perempuan mengalami menstruasi dan memiliki siklus

hormon yang tidak dimiliki laki-laki. Perempuan melahirkan dan menyusui; laki-laki tidak.

Tubuh perempuan menghasilkan lebih banyak estrogen (hormon perempuan) dan tubuh laki-laki menghasilkan lebih banyak androgen (hormon laki-laki). Rata-rata, perempuan memiliki pinggul lebih besar, memiliki payudara dan lebih banyak lemak tubuh daripada laki-laki; laki-laki memiliki bahu lebih lebar dan lebih banyak massa otot daripada perempuan. Perempuan memiliki sedikit rambut di tubuh dan laki-laki relatif lebih banyak. Bahkan penyakit yang diderita laki-laki dan perempuan berbeda, sampai batas tertentu, fakta yang menjadi semakin penting untuk peneliti medis.⁸

Teori evolusi berpendapat bahwa selama sejarah spesies manusia, laki-laki dan perempuan telah mengalami tekanan evolusi yang agak berbeda. Edward O. Wilson, bapak sosiobiologi modern, dalam buku Lippa⁹, mengatakan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengandung, menyusui, dan merawat anak-anak sehingga mereka berevolusi menjadi keibuan. Naluri keibuan itu membuat para perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam setiap tindakan mereka. Sementara laki-laki bertanggung jawab untuk berburu dan bertarung, sebab itu mereka berevolusi menjadi lebih agresif dan memiliki keleluasaan yang lebih baik

⁸ Richard A. Lippa, *Gender, Nature, and Nurture-Psychology Press* Second Edition, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2005, hal.85

⁹ *Ibid.*, hal.87

daripada perempuan. Sementara menurut Sarah Hrdy, dalam Lippa¹⁰, meskipun perempuan cenderung memiliki naluri keibuan sehingga menjadikannya berhati-hati dalam setiap tindakan mereka, namun naluri keibuan itu terbukti muncul bergantung pada sejumlah faktor situasional.

Lippa juga menyimpulkan bahwa laki-laki adalah contoh model dari uang, kekuasaan, status, dan bakat. Jika dilihat dari perspektif evolusi, itu semua mereka lakukan sebagai strategi untuk menarik pasangan. Melalui kreatifitas dan kesuksesan karir mereka, para laki-laki bersaing satu sama lain untuk secara tidak langsung menunjukkan kepada perempuan bahwa mereka memiliki gen dan sumber daya manusia yang baik dengan harapan para perempuan, yang secara teori evolusi mencari bibit terbaik untuk keturunan mereka, akan tertarik. Hal ini disebabkan karena menurut perempuan, laki-laki yang memiliki kekuasaan cenderung lebih menarik untuk dijadikan pasangan dan dapat mewariskan gen terbaiknya untuk keturunannya kelak.¹¹

Sekarang, mari kita bahas bagaimana perspektif gender dari nature (bawaan) menjadi nurture (dipupuk). Teori biologi menunjukkan kemungkinan bahwa beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan ada karena bawaan. Sebaliknya, teori pembelajaran sosial berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan ada karena dipelajari. Menurut ahli teori seperti Walter Mischel, Bussey & Bandura,

¹⁰ *Ibid.*, hal.85

¹¹ *Ibid.*, hal.92

dan dan Albert Bandura, dalam Lippa, perbedaan perilaku perempuan dan laki-laki dapat dijelaskan dengan istilah prinsip-prinsip pembelajaran yang dipahami dengan baik, seperti pengkondisian klasik, pengkondisian operan, dan pemodelan.¹²

Dalam bukunya, Lippa membahas pengkondisian milik Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran yang terjadi ketika stimulus netral (misalnya, bel) dipasangkan berulang kali dengan stimulus kedua tanpa syarat (mis., makanan). Contoh kasus ini bisa kita lihat pada anjing. Ketika melihat makanan (stimulus tanpa syarat), maka anjing langsung meneteskan air liur (respon tanpa syarat). Anjing meneteskan air liur hanya ketika terpancing oleh makanan. Sementara bel masih menjadi stimulus netral. Kemudian dalam pengkondisian klasik, bel dibunyikan kemudian makanan disajikan di hadapan anjing. Lalu anjing meneteskan air liur. Ketika proses pengkondisian ini, fungsi bel sudah berubah menjadi stimulus terkondisi dan air liur yang anjing teteskan sudah berubah menjadi respon terkondisi. Pengkondisian klasik terjadi ketika stimulus terkondisi (bel) memperoleh kekuatan untuk memicu respons (air liur), yang awalnya hanya dipicu oleh makanan. Seperti itu pengkondisian terjadi dengan cepat untuk respons yang tidak disengaja seperti air liur, perubahan denyut jantung, dan mata refleksif, respons yang tidak di bawah kendali sadar dan sukarela.¹³

¹² *Ibid.*, hal.104

¹³ *Ibid.*, hal.82

Masih dalam buku yang sama, Lippa mengambil pendapat dari Walter Mischel mengenai penerapan pengkondisian klasik terhadap gender. Pengkondisian klasik membantu menjelaskan mengapa label seperti “banci”, “tangguh”, atau “manis” memperoleh nilai diferensial untuk dua jenis kelamin. Kata banci biasanya digunakan untuk mengejek anak laki-laki dan karena dikaitkan dengan peristiwa yang memicu rasa malu dan jijik, kata itu menjadi sebutan yang sangat tidak menyenangkan bagi kebanyakan anak laki-laki. Anak laki-laki tidak akan mau berperilaku seperti banci jika konsep itu dikondisikan untuk menghasilkan kebencian dalam dirinya. Anak laki-laki sering kali tidak mau terlibat dalam aktivitas feminin seperti bermain dengan boneka, bermain rumah, dan berdandan. Menurut Mischel, ini mungkin karena anak laki-laki dikondisikan untuk memiliki perasaan yang buruk tentang kegiatan semacam itu.¹⁴

Masuk ke dalam penjelasan pengkondisian kedua, yakni pengkondisian operan. Pengkondisian operan terjadi ketika ada perilaku sukarela di dalamnya. Perilaku sukarela itu dikendalikan dan dipilih secara sadar dari dalam diri kita sendiri. Pengendalian dan pilihan secara sadar itu dibentuk oleh hukuman dan penghargaan atau keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan ketika melakukan suatu tindakan.¹⁵

Ahli teori pembelajaran sosial berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan secara sistematis diberi penghargaan dan hukuman untuk berbagai jenis

¹⁴ *Ibid.*, hal.104-105

¹⁵ *Ibid.*, hal.105

perilaku sepanjang hidup mereka. Akal sehat memberitahu kita bahwa anak laki-laki dan perempuan diberi imbalan untuk melakukan hal-hal yang sangat berbeda sepanjang hidup mereka. Akhirnya, anak-anak belajar berperilaku sebagai anak laki-laki atau perempuan dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Lippa mengutip Bandura & Huston, Bandura, Ross, & Ross, dan Mischel & Grusec dalam bukunya bahwa anak-anak belajar menjadi laki-laki atau perempuan dengan meniru orang tua yang memiliki berkelamin sama dengannya, saudara kandung, teman, dan tokoh media. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak paling mungkin untuk meniru siapa yang punya kuasa, memelihara, dan mengendalikan imbalan dalam kehidupan mereka. Maka bisa dikatakan apabila anak laki-laki meniru ayah mereka sementara anak perempuan meniru ibu mereka.¹⁶

Selanjutnya, Lippa juga menjelaskan mengenai pengkondisian ketiga, yakni pemodelan. Lippa dalam mengutip Bussey & Bandura menulis bahwa teori pembelajaran sosial modern juga menekankan keyakinan *self-efficacy* yang terkait dengan gender. Bentuk dari keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam mencapai sesuatu atau hasil yang diinginkan dalam hal ini adalah keyakinan anak-anak tentang kemampuan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti mengerjakan matematika atau mengurus bayi.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hal.82

¹⁷ *Ibid.*, hal.82

Lippa juga mendasarkan pandangannya pada teori dari Albert Bandura bahwasannya keyakinan *self-efficacy* juga tergantung pada level kemahiran pada pengalaman dan pengamatan model yang dijalani. Misalnya, jika seorang anak laki-laki sedang dalam proses menemukan keyakinan *self-efficacy* nya, dan dalam prosesnya itu ia melihat dan melakukan kegiatan bersama dengan ayahnya yang sangat mahir dalam kegiatan mekanik. Maka, keyakinan bahwa dirinya juga mahir dalam hal mekanik akan tumbuh dan makin terus bertambah sesuai dengan tingkat kemahiran dalam pengalamannya dengan ayahnya selama ini. Hal sebaliknya terjadi pada saudara perempuannya. Meskipun saudara perempuannya yakin bahwa ia juga memiliki kemampuan mekanik, tapi justru ia akan merasa tidak percaya diri dan ragu akan kemampuannya itu. Ketidakpercayaan diri dan keraguan itu ia rasakan karena ia kurangnya pengalaman dalam mencapai kemahiran itu.¹⁸ Jadi kembali ke awal bahwa anak laki-laki meniru ayahnya sedangkan anak perempuan meniru ibunya. Laki-laki meniru laki-laki dan perempuan meniru perempuan.

1.7.2 Budaya Patriarki

Bahasan mengenai gender tidak terlepas dari bagaimana patriarki memengaruhinya. Patriarki sendiri dilambangkan dengan kekuasaan para kaum laki-laki dalam menguasai berbagai sektor, baik sektor rumah tangga maupun pekerjaan. Kaum laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya atau kemampuannya daripada kaum perempuan sehingga menampilkan simbolik bahwa laki-laki lebih mulia daripada

¹⁸ *Ibid.*, hal.105-106

perempuan. Diperjelas dalam pengertian patriarki menurut KBBI bahwa patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.

Dalam Walby, dijelaskan bahwa penggunaan patriarki sebagai konsep memiliki sejarah penggunaan di antara para ilmuwan sosial seperti Weber yang menggunakannya untuk merujuk pada sistem pemerintahan di mana laki-laki memerintah masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Dalam penggunaan ini dominasi laki-laki muda yang bukan kepala rumah tangga sama pentingnya, meskipun tidak lebih penting daripada unsur dominasi laki-laki atas perempuan melalui rumah tangga.¹⁹

Pengertian konsep patriarki ini memiliki kemajuan manakala para feminis radikal mengembangkan unsur dominasi perempuan oleh laki-laki dan bagaimana laki-laki mendominasi satu sama lain. Hartman dalam Walby, menjelaskan bahwa memasukkan elemen generasi ke dalam definisi patriarki adalah sebuah kesalahan, karena dengan begitu hal tersebut sama saja menyiratkan bahwa teori ketidaksetaraan gender pada aspek dominasi laki-laki atas satu sama lain adalah pusat dominasi laki-laki atas perempuan. Hartmann menggunakan definisi yang menggabungkan hierarki generasi di antara laki-laki ini tidak menjadi pusat teori patriarkinya, yang mana berfokus pada kemampuan organisasi laki-laki untuk mengambil alih tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan berbayar, dan karenanya dalam rumah tangga. Sementara

¹⁹ Sylvia Walby, *Theorising Patriarchy*, Sociology Journal, Vol. 28 No. 2, May 1989, hal. 214

dalam praktiknya sendiri, beberapa teori kontemporer ketidaksetaraan gender menetapkan bahwa hal itu memang adalah kasusnya. Namun bagi Walby sendiri, patriarki tidak bisa diturunkan ke kapitalisme.²⁰

Walby sendiri mendefinisikan patriarki sebagai sistem struktur sosial, dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Penggunaan istilah struktur sosial penting di sini karena jelas menyiratkan penolakan terhadap determinisme biologis, dan gagasan bahwa setiap laki-laki individu berada dalam posisi dominan dan setiap perempuan individu dalam satu bawahan. Patriarki perlu dikonseptualisasikan pada tingkat abstraksi yang berbeda. Pada tingkat yang paling abstrak itu ada sebagai sistem hubungan sosial.²¹

Walby menganalisa bahwa terdapat sistem ganda dalam sebuah patriarki. Patriarki adalah hal yang berdampingan dengan kapitalisme. Adanya teori sistem ganda mempertimbangkan artikulasi patriarki dan kapitalisme dalam berbagai cara. Mereka bervariasi, misalnya, apakah mereka melihat patriarki dan kapitalisme seperti yang menyatu menjadi satu sistem patriarki kapitalis atau apakah mereka dikonseptualisasikan sebagai dua sistem yang berbeda secara analitis. Eisenstein dalam Walby, menganggap bahwa kedua sistem tersebut sangat erat antar-terkait dan simbiosis sehingga mereka telah menjadi satu. Dia menganggap bahwa patriarki menyediakan

²⁰ *Ibid.*, hal 214

²¹ *Ibid.*, hal 214

sistem kontrol dan hukum dan ketertiban, sementara kapitalisme menyediakan sistem ekonomi, dalam mengejar keuntungan.²²

Meskipun begitu, lain halnya dengan Hartmann. Dikatakan bahwa Hartmann dalam Walby, ingin melihat hubungan patriarki yang krusial beroperasi pada tingkat pengambilalihan tenaga kerja perempuan oleh laki-laki, dan bukan pada tingkat ideologi dan ketidaksadaran. Hartmann berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga dan tenaga kerja upah adalah situs penting eksploitasi perempuan oleh laki-laki. Dalam bidang pemisahan pekerjaan berbayar, digunakan oleh laki-laki terorganisir untuk menjaga akses ke pekerjaan berbayar terbaik untuk diri mereka sendiri, dengan mengorbankan perempuan. Dalam rumah tangga, perempuan melakukan lebih banyak tenaga kerja daripada laki-laki, bahkan jika mereka juga membayar upah pekerjaan tersebut.²³

Kedua bentuk pengambilalihan ini memperkuat satu sama lain, karena posisi perempuan yang kurang beruntung dalam pekerjaan berbayar membuat mereka kurang diuntungkan untuk mengatur pernikahan, dan posisi mereka dalam keluarga merugikan mereka dalam pekerjaan berbayar. Sementara kapitalisme mengubah sifat pekerjaan sampai batas tertentu. Hal ini didukung dengan sejarah tentang bagaimana

²² *Ibid.*, hal. 215

²³ *Ibid.*, hal. 215

perempuan telah dikecualikan dari pekerjaan yang lebih baik oleh pekerja laki-laki terorganisir dengan, dalam beberapa kasus, dukungan negara.²⁴

Walby menjelaskan dengan lebih bahwa konflik atas eksploitasi tenaga kerja perempuan antara kepentingan patriarki dan kapitalis adalah endemik sejarah interaksi antara kedua sistem. Tanpa gagasan pemisahan kedua sistem ini tidak akan mungkin untuk memahami perubahan divisi seksual dari pekerjaan berbayar. Pengusaha berusaha mempekerjakan perempuan, ketika mereka mencari tenaga kerja murah, karena mereka lebih murah daripada laki-laki. Suami secara historis menolak proses ini karena merusak kendali mereka atas dan eksploitasi perempuan dalam rumah tangga. Konflik kepentingan atas eksploitasi tenaga kerja perempuan ini terkadang telah mengambil bentuk perjuangan politik di tingkat negara. Interaksi antara patriarki dan kapitalisme ini memunculkan bentuk spesifik pemisahan pekerjaan berdasarkan seks.²⁵

Walby berpikir bahwa ada enam struktur patriarki yang membentuk sistem patriarki. Enam struktur tersebut adalah: modus produksi patriarki di mana tenaga kerja perempuan diambil alih oleh suami mereka; hubungan patriarki dalam upah buruh; negara patriarki; kekerasan laki-laki; hubungan patriarki dalam seksualitas; dan budaya patriarki. Setiap struktur terdiri dari sub-struktur dan praktik. Misalnya, diferensiasi pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu di pasar tenaga kerja adalah

²⁴ *Ibid.*, hal.215

²⁵ *Ibid.*, hal.216

salah satu praktik patriarki yang merupakan struktur hubungan patriarki dalam pekerjaan.²⁶

Laki-laki menganggap dirinya lebih mampu untuk memikul pekerjaan karena memiliki kekuatan yang telah dihasilkannya. Para laki-laki merasa mampu untuk mengeluarkan tenaganya karena mereka merasa itu adalah milik mereka sendiri, sementara tenaga perempuan adalah milik para laki-laki atau kebutuhan rumah tangga sehingga perempuan tidak memiliki kuasa penuh untuk mengeluarkan tenaganya. Sejauh ini struktur pekerjaan rumah tangga telah ditentukan secara teoritis. Ada tiga tahap klaim saya: pertama, bahwa pembagian tenaga kerja domestik adalah bentuk utama diferensiasi laki-laki dan perempuan; kedua, bahwa ini memiliki efek yang signifikan pada aspek lain dari hubungan sosial; ketiga, bahwa ini sendiri adalah bentuk ketidaksetaraan yang signifikan.²⁷

Dua jenis utama dari bentuk patriarki adalah patriarki publik dan pribadi. Patriarki swasta didasarkan pada pengecualian relatif perempuan dari arena kehidupan sosial selain dari rumah tangga, dengan patriarki yang menyetujui layanan perempuan secara individual dan langsung di lingkup rumah yang tampaknya pribadi. Patriarki publik tidak mengecualikan perempuan dari situs tertentu, melainkan men-bawahan perempuan di semuanya. Dalam bentuk ini persetujuan perempuan berlangsung lebih kolektif daripada secara individual. Bentuk patriarki yang lazim

²⁶ *Ibid.*, hal. 220

²⁷ *Ibid.*, hal. 221

saat ini adalah jenis patriarki publik. Perempuan tidak dikecualikan dari lingkup publik sampai batas yang sama. Namun, setelah memasuki lingkup publik, perempuan disubordinasi di sana. Sebagian besar perempuan dari semua kelas sosial terlibat dalam pekerjaan berbayar, tetapi ada kesenjangan upah yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan, dan pemisahan pekerjaan yang luas.²⁸

Berbicara mengenai patriarki maka, tak lepas dari bentuk otoritas dalam sebuah kekuasaan yang penuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak pengertian untuk kata otoritas itu sendiri. Setidaknya dari tiga pengertian otoritas menurut KBBI terdapat tiga pengertian yang peneliti anggap sesuai dengan penelitian ini. Pengertian pertama kata otoritas menurut KBBI adalah hak untuk bertindak. Pengertian kedua kata otoritas menurut KBBI adalah kekuasaan atau wewenang. Pengertian ketiga kata otoritas menurut KBBI adalah hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

Pandangan mengenai otoritas sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kekuasaan dirumuskan dengan lebih mendetail dan luas oleh para ahli ilmu sosial. Bagi Dahrendorf, otoritas bukan terletak pada individu, melainkan pada posisi. Otoritas adalah perihal subordinasi dan superordinasi. Mereka yang menduduki posisi pemegang otoritas adalah mereka yang diharapkan dapat mengendalikan para

²⁸ *Ibid.*, hal. 224

subordinat. Jadi pemegang otoritas mendominasi dikarenakan adanya harapan dari para subordinat untuk dikendalikan.²⁹

Lebih lanjut Dahrendorf mengatakan bahwa dalam setiap asosiasi, mereka yang berada pada posisi dominan berusaha mempertahankan status quo sementara yang berada pada posisi subordinat berusaha melakukan perubahan. Kepentingan superordinat dan subordinat bersifat objektif. Terdapat harapan yang melekat pada posisi tersebut dan harapan itu dibuktikan melalui peran. Individu yang memegang posisi tidak harus serta merta memenuhi harapan tersebut ketika menjalankan perannya. Jika mereka menduduki posisi tertentu, mereka diharapkan menjalankan organisasi sebagaimana yang diharapkan. Namun individu akan “dिसesuaikan” dengan peran mereka ketika menyumbang konflik antara superordinat dan subordinat.³⁰

Menurut Dahrendorf, jika ada otoritas maka akan ada konflik otoritas yang terjadi. Hal ini karena kedua kelompok tersebut, superordinat dan subordinat, sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan laten dan kepentingan manifes. Kepentingan laten (tersembunyi) adalah kepentingan dimana kelompok tersebut sudah berada dalam struktur namun belum menyadari keberadaan atau bahkan peran dalam posisinya. Sementara kepentingan manifes adalah kepentingan laten yang

²⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Terj. Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana, 2012, hal. 283

³⁰ Ibid., hal. 284

sudah disadari, sehingga ia menjadi kepentingan yang nyata. Hubungan kedua kepentingan ini adalah tugas utama dari suatu konflik.³¹

Selanjutnya, Lipset dalam Walby menganggap perempuan tidak relevan dengan politik di mana sebagai masyarakat demokratis bahkan ketika perempuan di dalamnya tidak memiliki suara. Diperkuat dengan anggapan Dearlove dan Saunders yang mencatat bahwa laki-laki mendominasi perempuan dan memang menggambarkan ini sebagai patriarki. Bahkan di mana isu-isu yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan antara jenis kelamin disebut, seperti yang menyangkut produksi tenaga kerja dan pengembangan negara kesejahteraan, signifikansi ini untuk hubungan gender diabaikan.³²

Walby juga menjelaskan patriarki dalam kewarganegaraana. Pengenalan berbagai tingkat kewarganegaraan tidak hanya tentang perkembangan kapitalisme, tetapi tentang transformasi patriarki. Hak-hak sipil dan politik dan pengembangan kemungkinan kewarganegaraan sosial melalui negara kesejahteraan adalah dasar penting dari pembentukan trans dari patriarki swasta ke publik. Negara kesejahteraan bertindak sebagai mekanisme pembayaran kesejahteraan dari mana perempuan secara tidak proporsional mendapat manfaat, karena mereka menerima lebih banyak manfaat daripada yang mereka bayarkan dalam pajak. Dengan demikian pengembangan kewarganegaraan sosial merupakan setidaknya sebanyak dengan mengubah hubungan

³¹ Ibid., hal.284

³² Sylvia Walby, *Gender Politics And Social Theory*, Sociology Journal, Vol. 22 No. 2, May 1988, hal. 215

gender seperti halnya dengan mengubah hubungan kelas. Mengingat pentingnya transformasi ini untuk hubungan gender tidak mengherankan bahwa perempuan memainkan peran aktif dalam berjuang untuk perubahan ini. Kewarganegaraan adalah tentang transisi dari patriarki swasta ke publik, tidak hanya peradaban kapitalisme.³³

Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketimpangan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan ternyata gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Bagaimana akhirnya perbedaan gender dapat menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).³⁴

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat menimpa kaum laki-laki dan perempuan disebabkan oleh berbagai kejadian. Misalnya, pengusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun, ada

³³ Sylvia Walby, *Is Citizenship Gendered?*, *Sociology Journal*, Vol. 28 No. 2, May 1994, hal. 391-392

³⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm.12

salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Dari segi sumber bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.³⁵

Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap kaum perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.³⁶

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Salah satu jenis stereotipe adalah yang bersumber dari pandangan gender. Umumnya penandaan atau stereotipe yang dilekatkan pada kaum perempuan. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Berakibat pendidikan kaum perempuan yang banyak dinomorduakan. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.³⁷

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua

³⁵ *Ibid.*, hal. 14

³⁶ *Ibid.*, hal. 15

³⁷ *Ibid.*, hal 16-17

pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bias gender mengakibatkan beban kerja tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya pandangan masyarakat yang memiliki keyakinan “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.³⁸

Manifestasi ketidakadilan gender terjadi diberbagai tingkatan. Pertama, terjadi dalam tingkatan negara. Kedua, terjadi di tempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. Ketiga, dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tafsiran keadamaan. Keempat, di lingkungan rumah tangga.

Penghapusan ketidakadilan gender salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan perspektif sensitif gender di berbagai bidang kehidupan. Menurut Callamard, perspektif sensitif gender ditandai dengan pemahaman bahwa peran laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh biologis tetapi lebih dibentuk oleh sistem sosial. Oleh karena itu, peran laki-laki dan perempuan bersifat kontekstual.³⁹

1.7.3 Hubungan Antar Konsep

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti di atas, yaitu bagaimana kemudian kuantitas anggota perempuan BEM UNJ yang tinggi tidak dibarengi dengan kualitas

³⁸ *Ibid.*, hal 21

³⁹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, hal. 22

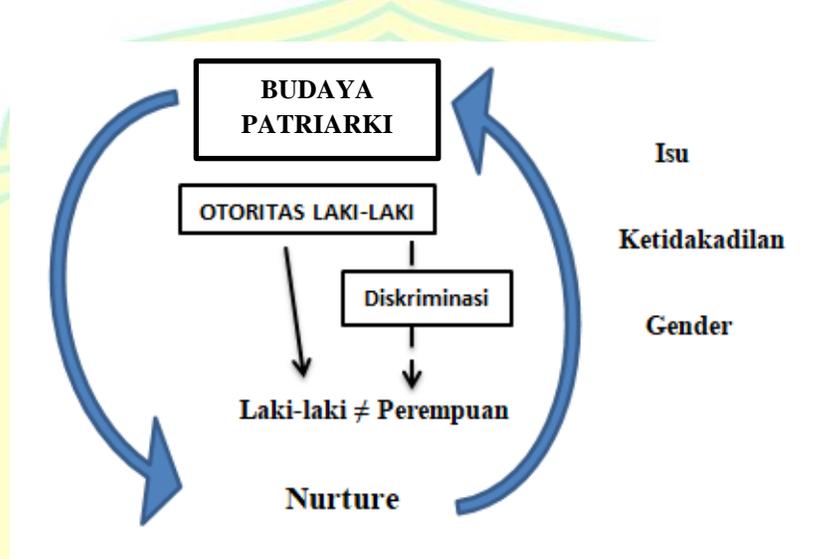
anggota perempuan dalam perolehan posisi strategis di kepengurusan BEM UNJ. Peneliti menggunakan konsep gender dengan mengedepankan nature dan nurture yang dalam perkembangannya melahirkan apa yang disebut dengan budaya patriarki. Kemudian bagaimana budaya patriarki yang ada di BEM UNJ berkembang hingga menciptakan adanya ketidakadilan gender yang dirasakan anggota perempuan BEM UNJ.

Peneliti ingin melihat bagaimana nature dan nurture menyebabkan otoritas selalu dipertahankan untuk dimiliki oleh anggota laki-laki BEM UNJ dalam setiap kepengurusan. Membuat budaya patriarki semakin melenggangkan otoritas yang dimiliki anggota laki-laki. Menempatkan anggota laki-laki di struktur teratas dan anggota perempuan menjadi bahawan. Semakin menutup kesempatan untuk kaum perempuan ikut berkontestasi dalam meraih posisi strategis dalam kepengurusan BEM UNJ.

Untuk lebih mudah memahami hubungan antar konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini maka peneliti memvisualisasikannya melalui alur pikir sebagai berikut :

Skema 1.2

Alur Pemikiran Permasalahan Penelitian



Sumber : Analisis Peneliti (2021)

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Menurut Neuman, data dalam penelitian kualitatif bersifat lunak (kata-kata, katigat, foto, simbol), tidak berwujud, dan sukar dipahami. Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan mendokumentasikan berbagai peristiwa nyata, merekam hal yang sesungguhnya dikatakan orang (dengan kata, gerak tubuh, dan nada), mengamati perilaku tertentu, memeriksa dokumen tertulis, dan mempelajari

citra visual.⁴⁰ Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami fenomena dalam kehidupan masyarakat serta aktivitas sosial lainnya.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian berupa penyelidikan mendalam dari suatu kasus dari satu periode atau beberapa periode tertentu.⁴¹ Peneliti menggali informasi secara mendalam, bagaimana partisipasi politik perempuan yang terjadi pada BEM UNJ dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai bagian dari metodologi penelitian, seperti menentukan lokasi dan waktu penelitian, siapa yang menjadi informan, serta teknik pengumpulan data. Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan topik permasalahan penelitian. Selanjutnya hasil data yang terkumpul akan dibuat suatu laporan deskriptif menyeluruh hingga menjadi penelitian yang relevan.

1.8.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, yang berlokasi di Jalan Rawamangun Muka, RT 11 RW 14, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2017 hingga Mei 2018. Pengamatan dan pengumpulan data di lokasi yang berbeda sesuai keberadaan informan, dilakukan pada hari-hari kegiatan berlangsung yaitu Senin sampai dengan Jumat.

⁴⁰ W Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh*, Jakarta: PT . Indeks, 2013, hlm. 198.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 47

1.8.3. Subjek Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah lima anggota perempuan BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017. Untuk membedah subjek penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang peneliti anggap memiliki pemahaman yang baik mengenai topik penelitian. Informan dalam penelitian berjumlah beberapa orang yang dibagi lagi berdasarkan kriteria sebagai berikut : **Pertama**, informan kunci yang memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai topik yang diangkat dan dapat menuntun peneliti ke informan selanjutnya. Yakni lima anggota perempuan BEM UNJ, baik yang termasuk ke BPH maupun anggota biasa atau staff departemen. **Kedua**, anggota laki-laki BEM UNJ baik yang termasuk ke BPH maupun anggota biasa. **Ketiga**, mahasiswa non-BEM UNJ atau yang bukan anggota.

Sumber data yang peneliti peroleh diantaranya data primer, yaitu data yang diperoleh hasil pengamatan langsung dari lokasi penelitian serta wawancara, seperti data tentang sejarah BEM UNJ, proses perekrutan anggota, peraturan, dan bagaimana berjalannya kegiatan-kegiatan di BEM UNJ. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumentasi kegiatan komunitas.

Tabel 1.2
Karakteristik Subjek Penelitian

Teknik Pengumpulan Data	Posisi Subjek Penelitian	Nama Informan	Cakupan Isi Data
Wawancara mendalam	Anggota perempuan BEM UNJ	<ul style="list-style-type: none"> • Julia Ristiana • Ima Nirwana • Siti Halimatussa'diyah • Tiara Mustika • Wafa' Wahidah 	Sejarah BEM UNJ, latarbelakang menjadi anggota BEM UNJ, hambatan serta peranan perempuan di BEM UNJ.
Wawancara mendalam	Anggota laki-laki BEM UNJ	<ul style="list-style-type: none"> • Miqdad Ramadhan • Bagus Tito Wibisono • Solehudin • Endra Pratama • Syahril Sidik • Moch Razan Dwi Anggoro 	Profil serta sejarah BEM UNJ, pandangan terhadap peranan perempuan di BEM UNJ, peraturan dan pengalaman selama menjadi anggota BEM UNJ.
Wawancara mendalam	Anggota non-BEM UNJ atau mahasiswa organisasi lain	<ul style="list-style-type: none"> • I Gede Arya Danny Pratama • Putri Eka 	Melihat kinerja BEM UNJ, memberi pandangan terhadap anggota perempuan BEM UNJ.

Sumber: Diolah Berdasarkan Penentuan Informan, 2018.

1.9. Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai orang yang meneliti atau pengamat penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencoba mencari tahu partisipasi politik perempuan dengan studi kasus lima anggota perempuan BEM UNJ selama periode

tahun 2015 hingga periode tahun 2017. Dinamika yang terjadi atas kesadaran akan kesetaraan gender dalam kontestasi kepengurusan BEM UNJ.

Bagaimana jumlah anggota perempuan lebih banyak daripada jumlah anggota laki-laki namun, posisi strategis didominasi oleh anggota laki-laki. Melihat budaya patriarki yang berkembang di BEM UNJ. Untuk mendapatkan data yang valid dan maksimal, peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui secara mendalam.

1.10. Teknik Pengumpulan Data

1.10.1. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan pengambilan data dengan menghubungi langsung para informan. Karena, sebagian besar informan sudah bukan merupakan mahasiswa atau sudah menyelesaikan masa studinya di UNJ. Peneliti juga melakukan observasi langsung dengan ikut terlibat di dalam pelaksanaan program. Peneliti dalam melakukan observasi ini dilakukan bersamaan dengan observasi partisipan.

1.10.2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan dinamika politik perempuan di BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada instrumen penelitian kemudian menanyakannya langsung kepada informan peneliti.

Tetapi bukan saat wawancara berlangsung improvisasi dari pertanyaan penelitian juga peneliti lakukan agar mendapat data yang lebih dalam lagi. Wawancara ini dilakukan beberapa kali dan secara bergantian sesuai dengan keperluan peneliti.

1.10.3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau studi pustaka dapat disebut sebagai data sekunder. Data-data tersebut dapat berupa foto atau dokumen-dokumen penting lain yang terkait dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dokumentasi seperti dokumen lembar pertanggungjawaban tiap periode masa BEM UNJ, foto-foto saat kegiatan BEM UNJ berlangsung, hingga dokumen kegiatan internal dan eksternal yang juga digunakan peneliti sebagai dokumentasi yang dapat menunjang penelitian ini. Diharapkan, dengan dokumentasi tersebut, dapat memberikan gambaran yang nyata tentang fokus penelitian ini.

1.11. Keterbatasan Penelitian

Selama proses penelitian dilakukan, tentu banyak ditemukan kendala sehingga sedikit menghambat kelancaran penelitian peneliti. Kendala tersebut adalah sulitnya menghubungi para informan pada kepengurusan BEM UNJ periode tahun-tahun sebelumnya yang kebanyakan sudah lulus sehingga sulit untuk ditemui. Kemudian beberapa kali tidak jadi untuk wawancara karena terdapat keadaan tak terduga, baik dari pihak informan maupun peneliti sendiri. Ketidaktahuan informan akan informasi

seperti mengenai sejarah BEM UNJ, menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam penelitian penelitian ini.

1.12. Triangulasi Data

Penelitian ini membutuhkan keabsahan atau validasi data yang diperoleh dari proses pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Triangulasi data sendiri adalah ide untuk melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang sehingga dapat meningkatkan keakuratan data yang diperoleh.⁴² Maka dari itu, peneliti melakukan triangulasi data untuk menguatkan data penelitian dengan cara penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga data yang didapat benar-benar terjamin keabsahannya. Triangulasi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu kepada anggota laki-laki BEM UNJ dan mahasiswa biasa non-BEM UNJ atau bukan anggota BEM UNJ yang mengikuti organisasi mahasiswa lainnya.

1.13. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dengan sistematika penelitian yang terdiri dari tiga bab yaitu; satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, satu bab analisis, dan satu bab kesimpulan. **BAB I**; Pendahuluan, peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. **BAB II**; Konteks Sosio-Historis Badan Eksekutif Mahasiswa, bab ini akan menjelaskan

⁴² W. Lawrence Neuman, *Op.Cit*, Hlm. 186

gambaran umum BEM UNJ, awal mula terbentuknya, struktur organisasi, profil informan utama, hingga proses perekrutan anggota.

BAB III; Peneliti akan memfokuskan penelitian pada hasil temuan di lapangan yaitu latar belakang keanggotaan BEM UNJ dengan studi kasus tiga anggota perempuan BEM UNJ periode tahun 2015 hingga periode tahun 2017. Peneliti akan menjelaskan fungsi peran anggota perempuan di dalam kepengurusan dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat anggota perempuan dalam memperoleh posisi strategis. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana anggota laki-laki dalam posisi strategisnya di kepengurusan BEM UNJ dan terakhir ketidakadilan gender yang mungkin terjadi.

BAB IV; Berisi pembahasan analisis dari hasil temuan lapangan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pembahasan permasalahan yang akan dikaji peneliti dengan menggunakan konsep gender berfokus pada nature dan nurture, budaya patriarki dan ketidakadilan gender. **BAB V;** Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi dari peneliti mengenai penelitian yang dikaji.